

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat membuat penggunaan internet dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat. Akses informasi melalui internet merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang sangat penting saat ini. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa. Sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono menjelaskan, jumlah pengguna internet pada tahun 2017 tersebut mencakup 54,68 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang (ekonomi.kompas.com, 19 Februari 2018). Sementara itu pertumbuhan pengakses internet Indonesia seperti dilansir dalam zonautara.com (30 Januari 2018) sejak tahun 2000 hingga 2017 tumbuh luar biasa, yakni sebesar 6.535 persen. Indonesia berada di peringkat kelima pengguna internet dunia. Sesuai peringkat Internet World Stats, Indonesia hanya kalah dari Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Brasil.

Escobar & Bonson (2005) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian dengan munculnya proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

***JUDUL UTAMA* FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional.

Menurut West (2005) *e-government* adalah bentuk aplikasi dari teknologi informasi, terutama teknologi internet untuk memperkaya akses, penyampaian informasi dan pelayanan Pemerintah untuk masyarakat, unit bisnis, pegawai, dan *stakeholder* lainnya. Implementasi *e-government* terus mengalami peningkatan,

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

terdapat 19% dari seluruh organisasi Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi *e-government*. Melalui Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan pelaksanaan pemerintah berbasis internet atau yang biasa dikenal *e-government* untuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tahapan awal dari tindak lanjut inpres tersebut adalah pembentukan *website* resmi seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah yang kemudian diatur melalui *blueprint e-government* untuk pemerintah daerah yang dikeluarkan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Hal tersebut mendukung Pemerintah pusat yang mewajibkan pemda menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas pemda, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menunjukkan transparansi pemda. Informasi ini wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan amanah dalam PP No 56 tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah, PP No 3 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa informasi penyelenggaraan pemda harus disampaikan kepada publik, serta UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Sinyal dari pemerintah terhadap masyarakat berupa penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan transparan, hal ini dapat dilakukan pemerintah melalui *website* yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. *Website* pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di Internet (Laswad, Fisher, & Oyelere, 2005).

Menurut Scott dalam Trisnawati & Achmad (2014) Publikasi informasi keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat transparansi. Menurut Rahim & Martani (2015) banyaknya manfaat yang diperoleh dengan penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi pemerintah daerah namun disisi lain tidak diiringi dengan tersedianya ketentuan khusus yang mengatur seberapa besar pengungkapan pada *website* resmi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga di Indonesia pengungkapan informasi pada *website* resmi pemda masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya tingkat pengungkapan informasi masih beragam di setiap *website* pemda. Motivasi untuk secara sukarela melaporkan informasi pemerintahan pada *website* bergantung kepada urgensi masing-masing pemda, sehingga pengungkapan yang lebih banyak pada *website* pemerintah daerah menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan *website* sebagai sarana yang efektif sebagai media penyampaian informasi pada kenyataannya masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari hasil survei kementerian dalam negeri setelah sepuluh tahun

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

diberlakukannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 yang merupakan tahap awal pengembangan *e-government* yaitu dengan pembentukan situs resmi pemerintah daerah, masih terdapat 50 pemerintah daerah yang belum memiliki situs resmi dan 40 situs pemerintah daerah dalam keadaan *offline* atau tidak dapat diakses. Kemudian pada penelitian Rahim dan Martani (2015) dari 504 pemda yang memiliki kekuasaan otonom hanya 423 situs pemda yang dapat diakses, 28 pemda tidak memiliki situs resmi sementara 53 situs pemda tidak dapat diakses.

Pemda yang tidak memiliki *website* umumnya didominasi oleh kabupaten dan kota yang berada dibagian timur Indonesia, seperti yang berada pada provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Sementara itu *website* yang tidak dapat diakses umumnya dikarenakan *account suspended*, yang berarti akses untuk *website* tersebut dihentikan untuk sementara waktu disebabkan beberapa hal seperti pembayaran layanan yang belum lunas atau *account website* yang terlalu membebani server. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masih banyak pemda yang melaksanakan pengadaan *website* hanya untuk mematuhi Inpres No 3 tahun 2003, namun pemeliharaan *website* masih terbatas. *Account suspended* pada hasil observasi penulis umumnya dikarenakan pemda yang bersangkutan tidak membayar biaya berlangganan atas alamat *website*. Aplikasi pelaksanaan Inpres No 3 tahun 2003 masih terbatas pada ketersediaan, sementara pengembangan dan pemeliharaan masih belum menjadi hal yang terlalu diperhatikan pemda sehingga hal ini menjadi satu hambatan untuk pengembangan *e-government* di Indonesia yang rata-rata masih berada pada tahap pertama (Rahim dan Martani, 2015).

Kaitannya dengan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah pada *website*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Penelitian

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat penyajian informasi keuangan pemerintah pada *website* telah dilakukan di beberapa negara, seperti pada penelitian Chen, Pan, Wang, & Shen (2016) mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat penyajian informasi pemerintah provinsi di China. Laswad et al (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah di New Zealand, dan ditemukan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, *press visibility* memiliki hubungan positif dengan pelaporan keuangan di internet, sementara tipe pemerintah *district council* memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada pemda di New Zealand.

Beberapa penelitian di Indonesia mengenai informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Seperti pada penelitian Prasasti et al (2017) Rahim & Martani (2015) menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah pada situs internet. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi, baik pemerintah itu sendiri untuk mengetahui kinerja dan melakukan evaluasi, serta masyarakat dan investor untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Trisnawati & Achmad (2014) dan Hendriyani & Tahar (2015) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap penyajian informasi keuangan pemerintah daerah pada situs resminya.

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Undang-undang No 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator kinerja pemda. Menurut Craven & Marston dalam Puspita & Martani (2012) pemda yang memiliki performa yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela (seperti dalam bentuk *voluntary internet-based disclosure*) dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi untuk masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal semakin rendah. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan semakin tinggi pula tuntutan transparansi atas penyajian dan pelaporan keuangan. Penelitian (Khudri, Martani, & Maulana, 2013) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat penyajian informasi pada *website* pemda, berbeda dengan penelitian Prasasti et al (2017) yang gagal membuktikan bahwa tingkat kemandirian mempengaruhi tingkat penyajian informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Penelitian (P, Sutaryo, & Budiarmanto, 2013) (Trisnawati & Achmad, 2014) (Laswad et al., 2005) menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang (*Leverage*) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemda melalui internet. *Leverage* mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai asset yang dimiliki. *Leverage* yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan kreditor semakin besar (Trisnawati & Achmad, 2014). Namun berbeda dengan penelitian (Hudoyo & Mahmud, 2014)

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

(Medina, 2012) yang gagal membuktikan bahwa rasio pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pada situs resmi pemda.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Rahim dan Martani (2015). Penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya yaitu opini audit dan rasio kemandirian dan menambahkan variabel rasio pembiayaan utang karena ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh opini audit, rasio kemandirian, dan rasio pembiayaan utang terhadap tingkat penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyajian Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian terhadap penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh rasio pembiayaan utang terhadap penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh opini audit terhadap penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
2. Mengetahui pengaruh rasio kemandirian terhadap penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
3. Mengetahui pengaruh rasio pembiayaan utang terhadap penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Bagi Peneliti: diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana pengembangan kemampuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai opini audit, rasio kemandirian, dan rasio pembiayaan utang kaitannya dengan penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

**JUDUL UTAMA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

2. Bagi Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis: dapat digunakan sebagai bacaan awal untuk memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penelitian selanjutnya, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi timbal balik untuk perkembangan daerah serta memotivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan situs resminya dalam rangka penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab dari amanah yang diberikan.

**Tendi Trian Muhamad, 2018**

***JUDUL UTAMA* FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)